

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perusahaan-perusahaan kini menghadapi persaingan yang sangat ketat untuk dapat bertahan dalam pasar global. Perusahaan kini dituntut untuk memiliki berbagai keunggulan kompetitif agar mampu bersaing dengan perusahaan lainnya, tidak hanya dari kuantitas maupun kualitas produk yang ditawarkan namun juga mencakup pengelolaan keuangan dengan baik yang berarti berbagai kebijakan dalam pengelolaan keuangan harus dapat menjamin keberlangsungan usaha perusahaan dan hal tersebut ditunjukkan dengan besarnya laba yang dicapai suatu perusahaan. (Negara dan Suputra, 2017).

Wiryandari dan Yulianti (2009) menyatakan bahwa laba yang berkualitas adalah laba yang dapat mencerminkan kelanjutan laba (*sustainable earnings*) di masa depan, yang ditentukan oleh komponen akrual dan kas, dan dapat mencerminkan kinerja keuangan perusahaan yang sesungguhnya. Semakin berkualitas laba perusahaan, maka investor semakin tertarik untuk menjadi salah satu pemilik saham perusahaan tersebut.

Pihak manajemen sebagai pengelola perusahaan secara langsung tentu ingin memperoleh laba yang tinggi, hal ini tentu akan berpengaruh langsung pada bonus yang akan diperoleh pihak manajemen yang nantinya bonus yang diperoleh semakin tinggi pula seiring tingginya laba yang berhasil dicapai oleh perusahaan. Di sisi lainnya pengestimasi kekuatan laba (*earnings power*) dalam memperkirakan risiko investasi maupun kredit dari informasi laba tersebut akan dapat membantu para pemilik (*stakeholders*) sehingga pihak manajemen bertanggung jawab akan informasi laba tersebut yang mana kinerjanya diukur melalui pencapaian laba yang diperoleh (Negara dan Suputra, 2017).

Informasi laba haruslah menggambarkan keadaan ekonomi dan keuangan perusahaan yang sebenarnya, tetapi pada kenyataannya informasi ini justru seringkali menjadi target rekayasa pihak manajemen dan kadang kala kelengkapan informasi yang

dimiliki oleh manajer melebihi informasi yang dimiliki oleh pihak lain mendorong manajer sangat berpeluang untuk melakukan kecurangan untuk memaksimalkan kepuasan mereka sendiri. Tindakan manajemen untuk merekayasa dan mengatur laba sesuai dengan keinginan mereka dikenal dengan istilah manajemen laba (Dewi dan Fenny, 2010).

Alim (2009) menyatakan bahwa manajemen laba (*earnings management*) adalah upaya untuk mengubah, menyembunyikan dan merekayasa angka-angka dalam laporan keuangan dengan memperlakukan metode dan prosedur akuntansi yang digunakan perusahaan. Hal seperti ini biasanya terjadi pada laporan keuangan laba rugi, dimana pada laporan inilah perusahaan berusaha mencoba untuk melakukan praktek manajemen laba demi kepentingan yang ingin dicapai oleh perusahaan tersebut. Upaya untuk merekayasa informasi melalui praktik manajemen laba telah menjadi faktor utama yang menyebabkan laporan keuangan tidak lagi mencerminkan keadaan sesungguhnya suatu perusahaan. Oleh karena itu, perekayasaan laporan keuangan telah menjadi isu untuk digunakan sebagai sumber penyalahgunaan informasi yang merugikan pihak-pihak yang berkepentingan. Sehingga informasi yang disampaikan terkadang tidak mencerminkan keadaan sebenarnya. Pihak manajemen memiliki wewenang dan keleluasaan dalam memaksimalkan laba perusahaan untuk kepentingan pribadi dengan biaya yang harus ditanggung oleh pemilik perusahaan. Upaya untuk meningkatkan nilai perusahaan tidak lagi mencerminkan kinerja manajemen yang sesungguhnya, namun telah direkayasa sedemikian sehingga menjadi lebih baik sesuai dengan keinginan manajemen.

Fenomena praktek manajemen laba pada PT Inovisi Infracom (INVS) pada tahun 2015. Dalam kasus ini Bursa Efek Indonesia (BEI) menemukan indikasi salah saji dalam laporan keuangan INVS periode September 2014. Dalam keterbukaan informasi INVS bertanggal 25 Februari 2015, ada delapan item dalam laporan keuangan INVS yang harus diperbaiki. BEI meminta INVS untuk merevisi nilai aset tetap, laba bersih per saham, laporan segmen usaha, kategori instrumen keuangan, dan jumlah kewajiban dalam informasi segmen usaha. Selain itu, BEI juga menyatakan manajemen INVS salah saji item pembayaran kas

kepada karyawan dan penerimaan (pembayaran) bersih utang pihak berelasi dalam laporan arus kas.

Pada periode semester pertama 2014 pembayaran gaji pada karyawan Rp1,9 triliun. Namun, pada kuartal ketiga 2014 angka pembayaran gaji pada karyawan turun menjadi Rp59 miliar. Sebelumnya, manajemen INVS telah merevisi laporan keuangannya untuk periode Januari hingga September 2014. Dalam revisinya tersebut, beberapa nilai pada laporan keuangan mengalami perubahan nilai, salah satu contohnya adalah penurunan nilai aset tetap menjadi Rp1,16 triliun setelah revisi dari sebelumnya diakui sebesar Rp1,45 triliun. Inovisi juga mengakui laba bersih per saham berdasarkan laba periode berjalan. Praktik ini menjadikan laba bersih per saham INVS tampak lebih besar. Padahal, seharusnya perseroan menggunakan laba periode berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk (www.bareksa.com, 2015).

Pada Mei 2018 juga terjadi praktek manajemen laba pada PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) juga menjadi sorotan otoritas keuangan dan publik. Perusahaan pembiayaan berumur kurang lebih 18 tahun ini ternyata berada di ambang kepailitan. Perusahaan pembiayaan yang berada di bawah naungan Columbia Group tersebut di atas kertas terlihat dalam kondisi baik-baik saja. Rating utang perseroan sempat mendapatkan rating idA atau stabil dari Pefindo pada Maret 2018. Namun, kondisi perusahaan berubah 180 derajat. Rating utang perseroan berubah drastis dari stabil menjadi **idSD** (selective default) pada 9 Mei 2018 lantaran salah satu kupon Medium Term Notes (MTN) yang diterbitkan SNP gagal bayar. Imbasnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) **membekukan** kegiatan usaha SNP karena perseroan gagal membayar bunga MTN senilai Rp6,75 miliar pada 14 Mei 2018 melalui Surat Deputi Komisioner Pengawas IKNB II No. S-247/NB.2/2018. Diduga pihak SNP Finance tidak menyampaikan laporan keuangan dengan benar alias fiktif, sehingga perusahaan pemeringkat dan auditor tidak mengeluarkan peringatan atau warning sebelum gagal bayar terjadi.

Persoalan laporan keuangan ini sangat vital dan seringkali menjadi keruwetan bagi sebuah perusahaan bila tak dikelola dengan baik. PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencoba mengambil upaya mitigasi, yakni **mengusulkan** agar direktur keuangan selaku penyelenggara laporan keuangan wajib memiliki sertifikasi sebagai pihak yang diaudit (auditee). BEI menilai sertifikasi terhadap auditee cukup penting untuk meminimalisir kesalahan dalam pelaporan kinerja keuangan. Selain itu, BEI juga mengusulkan kriteria dari sertifikasi itu, yakni independen dan tidak memiliki ikatan keluarga. Usul dari BEI ini mendapatkan dukungan dari Ikatan Akutan Indonesia (IAI). Dunia usaha juga turut mendukung agar direktur keuangan memiliki standar dan kompetensi khusus dalam membuat laporan keuangan.

Penelitian mengenai manajemen laba telah banyak dilakukan. Namun, hasil dari penelitian tersebut tidak memberikan hasil yang konsisten terhadap perusahaan yang melakukan praktek manajemen laba. Sumomba dan Hutomo (2012) menemukan bahwa manajemen melakukan praktek manajemen laba tahun 2008 dan tahun 2009 melalui perencanaan pajak. Hal ini dilakukan oleh manajemen atas reaksi mereka terhadap perubahan tarif pajak. Pada tahun 2008, manajemen laba dilakukan untuk menghindari beban pajak tinggi di tahun 2009, karena tarif pajaknya 10% lebih tinggi dibandingkan tarif pajak tahun 2008. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi, Nuraina dan Amah (2014) dan Mahpudin (2017). Namun hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Aditama dan Purwaningsih, (2014) serta Wardani dan Santi, (2018) menyatakan bahwa perencanaan pajak tidak berpengaruh dalam melakukan manajemen laba.

Faktor lain mengatakan bahwa beban pajak tangguhan dapat dijadikan sebagai variabel penentu manajemen laba selain aset pajak tangguhan. Hakim dan Praptoyo (2015) menemukan bukti empiris bahwa beban pajak tangguhan dapat digunakan untuk melakukan manajemen laba guna menghindari kerugian perusahaan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menunda pendapatan dan mempercepat untuk menghemat pajak salah satunya dengan

merekayasa beban pajak tangguhan sehingga memungkinkan manajemen melakukan manajemen laba. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Negara dan Suputra, (2017) dan Sumomba dan Hutomo (2012). Akan tetapi hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Febrianto (2014) dan Aulia, Puspa dan Herawati (2014), yang menemukan hasil bahwa beban pajak tangguhan tidak berpengaruh signifikan terhadap praktek manajemen laba.

Selain itu, ukuran perusahaan juga dapat menjadi indikasi terjadinya manajemen laba. Sutikno, Wahidawati dan Asyik (2014) meneliti bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Ini mengindikasikan bahwa besar kecilnya total penjualan yang dimiliki perusahaan yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan berdampak terhadap manajemen laba yang dilakukan perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ningsaptiti (2010) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Ini mengindikasikan bahwa besar kecilnya total penjualan yang dimiliki perusahaan yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan berdampak terhadap manajemen laba yang dilakukan perusahaan. Hal ini disebabkan perusahaan besar cenderung lebih kecil melakukan tindakan manajemen laba dibandingkan perusahaan kecil. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Prasetya dan Gayatri (2016) serta Suwito dan Herawaty (2005), yang menemukan hasil bahwa ukuran perusahaan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap praktek manajemen laba.

Penelitian sebelumnya tentang perencanaan pajak, beban pajak tangguhan dan ukuran perusahaan dengan manajemen laba menunjukkan bahwa ketidak konsistenan hasil serta adanya beberapa pandangan yang berbeda tersebut, maka peneliti ingin melakukan pengujian ulang dari penelitian-penelitian yang sebelumnya untuk menguji pengaruh perencanaan pajak, beban pajak tangguhan, dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba.

Penelitian ini mengembangkan penelitian dari Negara dan Suputra (2017) yang meneliti tentang pengaruh perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba. Berbeda dengan penelitian mereka, penelitian ini menambahkan variabel

lain yaitu ukuran perusahaan yang diprediksi akan berpengaruh terhadap manajemen laba. Penambahan variabel ukuran perusahaan dalam penelitian ini didasarkan pada penelitian Sutikno, Wahidahwati dan Asyik (2014) yang menjelaskan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kegiatan manajemen laba.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2012-2016”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Perencanaan Pajak berpengaruh terhadap Manajemen Laba?
2. Apakah Beban Pajak Tangguhan berpengaruh terhadap Manajemen Laba?
3. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Manajemen Laba?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba
2. Untuk mengetahui pengaruh Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba
3. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan tambahan bukti empiris dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengaruh perencanaan pajak, beban pajak tangguhan, ukuran perusahaan terhadap manajemen laba serta sebagai referensi

bagi akademisi dan peneliti selanjutnya yang meneliti tentang manajemen laba yang serupa dimasa yang akan datang.

## **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada investor, kreditor, dan bagi para pemakai laporan keuangan dan manajemen perusahaan dalam praktek manajemen laba yang dilakukan perusahaan dalam upaya meningkatkan nilai perusahaan sebagai tujuan utama perusahaan dan menjadi bahan masukan serta acuan bagi investor dalam melakukan investasi pada perusahaan.

## **3. Manfaat Kebijakan**

Bagi Bursa Efek Indonesia (BEI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan regulasi terkait lainnya. Penelitian ini bisa memberikan sumbangan pemikiran dalam membuat pengawasan terhadap perusahaan yang akan melakukan praktek manajemen laba.